

BAB IV

KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA MENGENAI BANTUAN KEMANUSIAAN

Bab IV berisi tentang rumusan masalah kedua yang ada di bab I. Pembahasan diawali dengan komitmen tentang bantuan kemanusiaan oleh Uni Eropa, kemudian bagian selanjutnya akan membahas kebijakan luar negeri Uni Eropa mengenai bantuan kemanusiaan berupa dana bantuan, dialog dengan negara mitra, dan program-program beserta beberapa studi kasus di berbagai negara yang nantinya akan dibahas juga kelebihan dan kekurangan dari bantuan kemanusiaan sampai saat ini.

A. Masalah Yang Dihadapi Di Negara-Negara Yang Sedang Krisis

Bencana merupakan peristiwa yang tiba-tiba, mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan kematian dan kehancuran dan untuk mengurangi dampak bencana, perlu untuk mengatasi akar penyebab kerentanan. Selain itu, menangani penyebab kerentanan secara langsung berkaitan dengan pencegahan langkah-langkah dalam kasus bencana di masa depan. Bantuan kemanusiaan adalah ekspresi mendasar dari nilai universal solidaritas antara orang dan keharusan moral. Dampak krisis kemanusiaan baik bencana alam ataupun buatan manusia terkait dengan sejumlah faktor, seperti mengubah sifat konflik, perubahan iklim, meningkatkan persaingan untuk akses ke energi dan sumber daya alam, kemiskinan ekstrim, pemerintahan yang buruk dan situasi kerapuhan. Korban utama adalah warga sipil, seringkali yang paling miskin dan paling rentan di antara mereka, terutama yang tinggal di negara berkembang.

Sumber daya manusia dan fisik perlu dimobilisasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan vital seperti untuk tempat tinggal, makanan, air dan perawatan

medis. Bantuan kemanusiaan tidak hanya untuk mereka yang terkena dampak langsung dari krisis mendadak. Pengungsi dan orang-orang terlantar, atau masyarakat yang terkena dampak krisis yang lebih berjangka lama seperti perang sipil yang mana masih belum dalam situasi yang memungkinkan program pembangunan struktural jangka panjang, juga umumnya bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Gender equality dalam aksi kemanusiaan adalah tentang menjangkau semua segmen penduduk yang terkena dampak secara efektif. Selain itu, integrasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam aksi kemanusiaan sangat penting untuk memastikan sistem kemanusiaan berbasis hak dan efektif untuk semua wanita, pria, anak laki-laki dan anak perempuan yang terkena dampak bencana dan konflik. Jika intervensi kemanusiaan tidak direncanakan dengan dinamika gender dalam pikiran, kebutuhan mereka yang paling beragam mungkin tidak cukup terpenuhi, dan kesempatan untuk mendukung perubahan positif akan hilang. Itulah sebabnya mengapa kesetaraan gender menjadi pusat aksi kemanusiaan.

Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda, menderita kerentanan yang berbeda, menghadapi risiko tertentu, tidak selalu memiliki akses ke hal yang sama sumber daya dan layanan, mengembangkan beragam mekanisme bertahan hidup dan memiliki kapasitas khusus untuk mendukung keluarga dan komunitas mereka selama dan sesudahnya bencana dan konflik.

Krisis juga memiliki dampak besar pada struktur komunitas dan keluarga, seperti meningkatnya jumlah rumah tangga kepala tunggal atau anak. Bagi yang bertanggung jawab merawat bagi keluarga mereka - seringkali wanita - krisis sering kali menyiratkan beban tambahan. Hal ini disebabkan sejumlah faktor seperti partisipasi pria dalam permusuhan dan suatu

meningkatnya jumlah orang yang sakit, terluka dan tanggungan untuk dirawat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Selain itu, di sebagian besar negara di seluruh dunia, ketidaksetaraan gender berulang kali terjadi perempuan dan anak perempuan lebih rentan dan dirugikan. Demikian juga, pria bisa menjadi korban kekerasan atau menderita spesifik kerentanan atau risiko (misalnya perekrutan anak laki-laki sebagai tentara anak atau kekerasan seksual ditargetkan pada anak laki-laki atau laki-laki). (Commission, Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance, 2013)

Upaya kemanusiaan harus mengakui fakta bahwa perempuan dan anak perempuan seperti laki-laki dan anak laki-laki, harus banyak berkontribusi dalam mempersiapkan, dan menanggapi krisis. Para aktor kemanusiaan harus merancang program untuk memenuhi kebutuhan kaum muda dan tua, pria dan wanita, dan memastikan bahwa semua memiliki akses yang aman dan setara untuk bantuan kemanusiaan. Untuk mencapai hal ini, semua kelompok harus dikonsultasikan dan secara aktif berpartisipasi dalam penilaian kebutuhan dan proses pengambilan keputusan. Wanita harus dimasukkan dalam pengambilan keputusan tentang bentuk-bentuk bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Aksi kemanusiaan juga dapat menghadirkan peluang bagi peran dan hubungan gender yang baru dan lebih progresif untuk muncul. (OCHA, n.d)

Selain menghadirkan bahaya dan hambatan untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama bagi perempuan, krisis secara radikal mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan politik di seluruh ruang pribadi dan publik. Sementara peristiwa semacam itu menciptakan risiko dan dapat memperburuk ketidaksetaraan. Krisis dapat menantang norma-norma gender yang diskriminatif dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Misalnya, dalam situasi konflik, wanita dapat mengambil peran penting

dalam membangun perdamaian dan mediasi, dan dapat mengambil tanggung jawab perawatan yang lebih besar. Mempromosikan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pemrograman kemanusiaan dan ruang pembuatan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa tanggapan perempuan dalam upaya mereka untuk menantang ketidaksetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender dapat membuat perempuan dan anak perempuan berada pada posisi yang lebih rentan dan juga dirugikan. Namun, perempuan juga memiliki kapasitas dan keterampilan khusus untuk berkontribusi pada pemulihan, membangun perdamaian, mengembangkan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketahanan. Saat situasi darurat dapat mengintensifkan perbedaan, mereka juga merupakan peluang untuk menentang ketidaksetaraan berbasis gender. (Commission, ECHO Factsheet, 2016)

Penting untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam menentang sikap dan keyakinan yang meremehkan hak-hak perempuan, dan untuk mempromosikan maskulinitas yang positif dan penerimaan *gender equality*. Dalam mengimplementasikan *gender equality*, peran laki-laki merupakan hal yang wajib, karena perempuan dan laki-laki hidup saling berdampingan dan diharapkan untuk bisa menghargai satu sama lain.

Kekerasan seksual dan berbasis gender (SGBV) tetap menjadi isu yang kompleks yang kurang dilaporkan dan kurang terarah dalam krisis kemanusiaan. Sementara perempuan dan anak perempuan menderita secara tidak proporsional dari kekerasan seksual dan berbasis gender, anak laki-laki dan laki-laki juga dapat menjadi korban. Meskipun aktor kemanusiaan sering fokus pada kekerasan seksual dalam situasi konflik, pemahaman kekerasan seksual dan berbasis gender dalam krisis kemanusiaan tidak

boleh direduksi menjadi kekerasan seksual atau perkosaan.

Jenis kekerasan lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga, praktik-praktik tradisional yang berbahaya dan kekerasan sosio-ekonomi dapat tersebar luas di masyarakat yang terkena dampak dan tidak boleh diabaikan. (Commission, Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance, 2013) Sejak 2014, Uni Eropa sudah mengalokasikan dana lebih dari 1 juta euro per tahun untuk proyek pembangunan kapasitas global tentang gender dan kekerasan berbasis gender dalam krisis kemanusiaan.

Kekerasan berbasis gender berakar pada hubungan kekuasaan gender yang tidak setara dan sering meningkat di saat krisis. Eksploitasi dan pelecehan seksual juga bisa terjadi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk: kerusakan hukum dan ketertiban yang menyebabkan impunitas bagi para pelaku kekerasan; risiko yang terkait dengan perpindahan; dan penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat diperparah oleh ketersediaan senjata, juga dapat meningkat selama dan setelah konflik. Baik selama dan di luar krisis, perempuan dapat dipaksa menikah oleh tekanan budaya dan kurangnya peluang mata pencaharian. Dalam keadaan darurat, perempuan dan anak perempuan kadang-kadang dipaksa untuk terlibat dalam seks dengan imbalan uang, sumber daya, atau akses ke layanan dan aset.

Kekerasan seksual berbasis gender tetap menjadi isu yang tidak dilaporkan dan kurang ditangani dalam masalah krisis kemanusiaan. Untuk berbagai alasan - termasuk ketakutan akan pembalasan atau stigma, rasa malu dan kurangnya akses ke perawatan yang memadai yang mereka pikir bahwa jika mereka diam, mereka akan tetap aman. Hal inilah yang membuat ketentuan tanggapan untuk menyelamatkan jiwa sangat sulit dan

meninggalkan kekerasan sebagian besar tidak terlihat. Terlebih lagi, kekerasan seksual berbasis gender adalah masalah yang sangat rumit. Korban dan orang yang selamat bisa bervariasi.

Ada pengakuan yang meningkat di antara para aktor kemanusiaan tentang urgensi untuk memastikan bahwa kebutuhan yang berbeda dari perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki diperhitungkan dan dimasukkan dalam semua bantuan kemanusiaan. Kegagalan untuk melakukannya menghambat respons kemanusiaan yang efektif dan dapat membahayakan jiwa penerima manfaat. Aktor kemanusiaan tentang kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki telah meningkat. Mereka memperhitungkan semua kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam bantuan kemanusiaan. Bantuan yang diberikan oleh pendonor akan membantu terselamatkannya banyak nyawa dan terpenuhinya kebutuhan penerima bantuan.

Kerentanan gender menjadi penting dan menempatkan fokus khusus pada hubungan gender, bukan kebutuhan wanita dan posisi mereka. Tetapi juga menekankan masalah kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam konteks terluasnya. Selain itu, saling ketergantungan antara perempuan dan laki-laki, sebagai bagian dari mata pencaharian strategi mereka, perlu diperiksa juga.

Kerentanan gender tidak berasal dari satu faktor, seperti itu sebagai kepala rumah tangga atau kemiskinan, tetapi mencerminkan pola khusus secara historis dan budaya hubungan dalam institusi sosial, budaya dan kehidupan pribadi. Berpotongan dengan ekonomi, rasial dan ketidaksetaraan lainnya, hubungan ini menciptakan kondisi sosial berbahaya yang berbeda kelompok wanita berbeda berisiko ketika peristiwa bencana terungkap. (Blaikie, Cannon, Davis, & Wisner, 1994)

B. Strategi Gender Uni Eropa Didalam Bantuan Kemanusiaan

Definisi *Humanitarian Aid* menurut Uni Eropa adalah memberikan bantuan yang menyelamatkan hidup bagi mereka yang membutuhkan, tanpa perbedaan yang merugikan. Uni Eropa membedakan bantuan kemanusiaan dari kegiatan lain, misalnya aktivitas politik, agama, ideologis atau militer. Kepatuhan pada prinsip-prinsip kemanusiaan memfasilitasi akses dan penerimaan, dan membantu pekerja kemanusiaan melaksanakan pekerjaan mereka. Di tingkat Uni Eropa, prinsip-prinsip kemanusiaan diabadikan dalam *European Consensus on Humanitarian Aid*, yang ditandatangani pada bulan Desember 2007 oleh Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa dan Komisi Eropa. Konsensus adalah kerangka inti yang memandu kebijakan bantuan kemanusiaan Uni Eropa, memberikan visi dan prinsip bersama, serta pendekatan praktis.

Negara-negara Anggota Uni Eropa, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa mencapai perjanjian untuk *the European Consensus on Humanitarian Aid* di tahun 2007. Memberikan kerangka kebijakan yang kuat dan "visi bersama" bagi Uni Eropa dan Negara-negara Anggota dalam mengembangkan kebijakan dan strategi kemanusiaan mereka dan berfungsi sebagai dokumen penting untuk mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan. (Schenkenberg, 2014) *European Consensus on Humanitarian Aid* adalah kebijakan komprehensif pertama yang menetapkan pendekatan Uni Eropa dan Negara-negara Anggota atas bantuan kemanusiaan. Langkah-langkah dampak konflik bersenjata dan kekerasan sering berfokus pada korban jiwa, bukan kekerasan berbasis gender dan perempuan cenderung kurang terlihat dalam menentukan tanggapan. (Oxfam, 2013)

Melestarikan kehidupan, mencegah dan mengurangi penderitaan dan membantu menjaga martabat manusia dalam menghadapi bencana alam dan konflik buatan manusia adalah tujuan utama dari tindakan kemanusiaan, sebagaimana diabadikan dalam *The EU Consensus on Humanitarian Aid*. Uni Eropa menegaskan, kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar bantuan kemanusiaan yaitu netralitas, kemanusiaan, kemandirian, dan ketidakberpihakan dan penghormatan Hukum Humaniter Internasional. Uni Eropa merupakan donor terbesar di dunia selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan ketentuan Konsensus, negara-negara dan lembaga-lembaga Uni Eropa setuju untuk bekerja secara terkoordinasi dan komplementer, dan mendukung keseluruhan peran koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan berkisar mulai dari kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, bantuan dalam krisis berkepanjangan hingga pemulihan awal dan terkait dengan kerja mitra pembangunan. Konsensus juga menetapkan modalitas penggunaan kapabilitas perlindungan sipil dan aset militer dalam tanggap darurat. (Commission, 2018)

Kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai perilaku negara yang berkaitan dengan negara lain di arena internasional, didorong oleh kebutuhannya untuk mencapai tujuannya. Negara memiliki beberapa alat yang dapat mereka gunakan untuk melanjutkan kebijakan luar negeri mereka seperti diplomasi, kerjasama dan perjanjian asosiasi, perdagangan, sanksi ekonomi, kekuatan militer, dan penggunaan bantuan asing. Bantuan asing adalah salah satu dari sejumlah alat yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memajukan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri mereka. (Palmer & Morgan, 2011)

Komisi Eropa memiliki *The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection*

department (ECHO) yang merupakan departemen yang setiap kali terjadi bencana atau darurat kemanusiaan, Uni Eropa akan menyediakan bantuan untuk negara-negara yang terkena bencana. Sejalan dengan empat prinsip yang didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional, bantuan kemanusiaan Uni Eropa seperti mengatasi penderitaan manusia dengan perhatian khusus pada kelompok orang yang paling rentan, sambil menghormati martabat semua korban (*humanity*); tidak mendukung pihak manapun dalam suatu konflik (*neutrality*); diberikan hanya berdasarkan kebutuhan, tanpa diskriminasi (*impartiality*); independen dari agenda apa pun, baik itu politik, ekonomi, militer atau lainnya (*independence*). Semua Negara Anggota Uni Eropa telah berkomitmen kepada mereka dengan meratifikasi Konvensi Geneva 1949.

European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan sejak 1992. Anggaran kemanusiaan tahunannya lebih dari € 1 miliar, Uni Eropa membantu lebih dari 120 juta orang setiap tahun. (Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, n.d) Secara kolektif, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya adalah donor bantuan kemanusiaan terkemuka di dunia. *The Treaty of Lisbon* memberikan dasar hukum untuk bantuan. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang menderita, apa pun kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau asal etnis mereka.

The European Commission's Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department (ECHO) memberikan bantuan di semua zona krisis besar di seluruh dunia termasuk Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Liberia dan di negara-negara yang menghadapi ketidakstabilan paska konflik atau bencana alam. ECHO juga berkontribusi untuk menanggulangi krisis pengungsi di Eropa, juga dengan memobilisasi

saluran perlindungan sipil Uni Eropa. Pendanaan untuk operasi bantuan kemanusiaan ditujukan untuk negara-negara di luar Uni Eropa. Komisi Eropa juga dapat mendanai operasi bantuan darurat untuk menanggapi bencana skala luar biasa dalam Uni Eropa.

Uni Eropa membantu meningkatkan kesadaran akan 'krisis yang terlupakan' yang seringkali menjadi krisis berkepanjangan yang telah luput dari perhatian media dan komunitas internasional. *European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department* (ECHO) menangani bantuan yang didanai UE. Bantuan kemanusiaan disalurkan melalui lebih dari 200 organisasi dan lembaga mitra di lapangan, termasuk: organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi internasional, masyarakat Palang Merah, dan badan-badan PBB. (Union, Humanitarian aid & civil protection, 2018)

Bantuan kemanusiaan yang didanai oleh Uni Eropa disampaikan dalam kemitraan dengan badan-badan PBB, organisasi internasional dan LSM. Bantuan kemanusiaan Uni Eropa mencakup bidang intervensi seperti makanan dan gizi, tempat tinggal, perawatan kesehatan, air dan sanitasi dan pendidikan dalam keadaan darurat. Jaringan besar para ahli kemanusiaan Komisi di lebih dari 40 negara di seluruh dunia memungkinkan pemantauan ketat situasi krisis dan operasi pertolongan. Krisis kemanusiaan telah menyebabkan sejumlah besar orang terlantar dan harus mengungsi ke tempat yang lebih layak. (Commision, n.d) Pada 2007, 27 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 39 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Selama 10 tahun, kebutuhan kemanusiaan telah meluas karena dampak dari bencana alam dan konflik; lebih dari 101,2 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 65,6 juta dipaksa pindah.

Bencana alam dan krisis buatan manusia mempunyai akibat yang berbeda untuk perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dan orang tua. Oleh karena itu, gender perlu dipertimbangkan dalam respon kemanusiaan untuk memastikan bahwa bantuan ditujukan untuk kebutuhan khusus dari berbagai kelompok. Uni Eropa memiliki mandat kemanusiaan dan komitmen dalam mengimplementasikan dan mempromosikan *gender equality* diluar Uni Eropa serta meningkatkan kualitas program kemanusiaan untuk menjangkau orang-orang yang paling rentan atau gagal untuk menanggapi kebutuhan spesifik mereka secara memadai dan mengekspos populasi rentan terhadap risiko seperti kekerasan seksual dan berbasis gender. Untuk memastikan bahwa respon kemanusiaan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok yang berbeda, baik wanita dan pria, dan anak-anak harus dikonsultasikan dan harus berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi tindakan kemanusiaan.

Gender equality berfungsi sebagai penghubung strategis antara respon kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang. Bantuan kemanusiaan dapat meletakkan dasar untuk *gender equality*, mengurangi risiko dan membangun ketahanan terhadap krisis yang berulang dan dapat diprediksi dengan dengan aktifnya *gender mainstreaming*. Demikian pula, respons kemanusiaan dapat dirancang dan disampaikan dengan cara yang mendukung pemulihan dan pengembangan yang lebih baik dengan secara aktif mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan dan anak perempuan. Bukti menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di pasar tenaga kerja di daerah yang terkena dampak konflik cenderung meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan tingkat masyarakat secara keseluruhan, termasuk investasi dalam pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki. Contohnya, jika perempuan di beri

kuasa dalam mengelola uang, maka uang itu tidak akan habis untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi mereka menjamin bahwa keluarga mereka juga mendapatkan kebutuhannya. Jika dilakukan dengan cara yang benar, investasi dalam mata pencaharian perempuan dapat relevan sebagai tindakan protektif tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk pemulihan dan mengurangi kerentanan. (Justino, 2012)

Dalam bantuan kemanusiaan Uni Eropa, integrasi gender diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan dan kemandirian), konsep '*no harm*' dan nilai-nilai Uni Eropa lainnya, seperti non-diskriminasi. Lebih jauh lagi, ini dipandu oleh pendekatan yang berpusat pada rakyat dan prinsip *gender equality*. Krisis memiliki dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki dari segala usia. Misalnya, konflik sering mengarah pada lebih banyak rumah tangga yang dikepalai atau dikepalai anak dan menciptakan beban kerja tambahan untuk perempuan atau anak perempuan karena partisipasi laki-laki dalam permusuhan dan meningkatnya jumlah orang yang sakit, terluka dan tanggungan untuk dirawat dengan sumber daya yang langka. Juga, kekerasan berbasis gender dan eksploitasi dan penganiayaan seksual dilaporkan meningkat selama dan setelah masa konflik.

Kebijakan pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang ada di dalam kebijakan eksternal Uni Eropa juga memasukan *gender equality* sebagai salah satu tujuannya. Uni Eropa menyiapkan dana membuat program untuk membantu negara-negara ketiga di dunia yang sedang mengalami krisis atau dalam masa paska krisis. Hampir 10% dari seluruh bantuan eksternal dipakai untuk aktivitas *humanitarian aid* di berbagai negara. *European Consensus on Humanitarian Aid* merupakan kerangka kebijakan untuk Uni Eropa dalam bertindak sebagai tanggapan terhadap krisis

kemanusiaan. Sampai saat ini ada beberapa tema bantuan kemanusiaan dalam *The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department* (ECHO), salah satunya adalah *gender-sensitive aid* atau bantuan yang peka terhadap masalah gender.

Komisi menggarisbawahi bahwa sementara kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan yang digerakkan kerentanan dan meningkatkan ketahanan, setiap risiko serangan balik harus dikurangi. Seperti risiko yang dapat berasal dari transformatif gender atau memberdayakan tindakan yang dilakukan di konteks bantuan kemanusiaan jangka pendek. Misalnya, risiko kekerasan dalam rumah tangga sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam hubungan kekuasaan intra-rumah tangga setelah pekerjaan tunai-untuk-bekerja penargetan program perempuan harus dinilai secara hati-hati. Langkah-langkah mitigasi seharusnya diberlakukan untuk menghindari konsekuensi negatif, baik selama dan setelah tindakan. (Commission, Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance, 2013)

Uni Eropa melaksanakan upaya yang besar dan sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk mendukung dan membantu negara-negara yang berada pada kondisi darurat. Setiap tahunnya, Uni Eropa beserta dengan Dewan dan Komisi melakukan evaluasi untuk memperbaiki prosedur yang dipelajari. Uni Eropa juga sebagai promotor paling lantang terhadap perjanjian internasional dalam bidang hak asasi manusia, perlindungan dan juga sebagai aktor perdamaian. Uni Eropa dikenal sebagai salah satu pendiri nilai *gender equality*, dan hampir semua kebijakan yang diadopsi oleh Komisi Eropa selalu memasukkan gender equality sebagai tujuan utama.

Reputasi Uni Eropa di dunia internasional sebagai pendonor mempermudah untuk bermitra dengan organisasi internasional dan organisasi bukan pemerintah di negara-negara yang sedang dalam masa krisis. Humanitarian aid merangkap bantuan di banyak hal seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, sanitasi, makanan, dan lain lain. Maka itu, masih banyak terjadi di beberapa negara implementasi gender mainstreaming masih sering kurang efektif dan maksimal. Masih banyak perempuan dan laki-laki yang belum bisa mencapai bantuan dan masih menjadi korban kekerasan berbasis gender, pelecehan, dan diskriminasi.

The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO) mengembangkan panduan tentang bagaimana menerapkan kebijakan perlindungan kemanusiaan dan sipil Uni Eropa. Panduan semacam itu membantu mitra lapangan, menerapkan program yang didanai Uni Eropa, lebih memahami bagaimana kebijakan harus diterapkan. Komisi Eropa berusaha untuk memastikan bahwa gender dan usia selalu diutamakan dalam operasi kemanusiaan yang didanai Uni Eropa. Selain itu, Komisi mendukung aksi-aksi yang ditargetkan untuk mencapai kebutuhan kelompok rentan tertentu. Krisis kemanusiaan berakibat berbeda pada laki-laki dan perempuan dan perlu lebih memfokuskan solusi untuk perempuan yang sebagian besar menjadi korban akibat krisis atau konflik.

Komisi Eropa telah mengembangkan pendekatan gender untuk bantuan kemanusiaan, sejalan dengan *2007 European Consensus on Humanitarian Aid* dan rekomendasi dari laporan *2009 Gender Review* yang mengharuskan proyek-proyek yang didanai melalui anggaran kemanusiaan Uni Eropa mengikuti panduan yang digariskan dalam kebijakan tahun 2013 yaitu *Gender in Humanitarian Assistance: Different Needs, Adapted Assistance*. Berdasarkan prinsip-prinsip

kemanusiaan internasional dan sebagaimana ditetapkan dalam *European Consensus on Humanitarian Aid*, Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan berbasis kebutuhan kepada orang-orang yang terkena bencana alam dan buatan manusia dengan perhatian khusus kepada korban yang paling rentan.

Tujuan aksi kemanusiaan peka gender adalah untuk mendukung semua kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Meskipun mengakui bahwa, di seluruh dunia, diskriminasi gender terutama mempengaruhi perempuan dan anak perempuan, Komisi mendukung pemahaman yang luas tentang gender, yang tidak hanya berfokus pada perempuan dan anak perempuan tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan anak laki-laki yang berbeda. Komisi menganggap bahwa pemahaman yang komprehensif tentang kerentanan harus mempertimbangkan berbagai aspek keanekaragaman seperti usia, cacat, minoritas, dan lain-lain.

Membina bantuan kemanusiaan peka gender dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan dan meningkatkan keberlanjutan bantuan, dengan meningkatkan kapasitas semua anggota masyarakat, termasuk yang paling rentan untuk mengatasi masalah paska risis serta menjadi lebih siap untuk krisis yang akan datang. Meskipun berada di antara orang-orang yang paling rentan dan dirugikan yang dipengaruhi oleh krisis, perempuan perempuan dan anak juga memiliki kapasitas khusus untuk berkontribusi pada pemulihan bencana atau perdamaian, untuk membangun ketahanan dan untuk mendorong pengurangan risiko bencana. Sementara krisis sering memperburuk kerentanan yang ada, perubahan sosial yang diminta oleh waktu tersebut dapat menciptakan jendela peluang untuk menantang diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender. (Commision, Gender

in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance, 2013)

Dokumen staf "*Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020*" menyediakan kerangka pemantauan dan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur kemajuan pada *gender equality* mencakup hak-hak dan pemberdayaan perempuan di negara-negara berkembang, membesar dan lingkungan, termasuk dalam situasi yang kritis, konflik dan darurat. Berlaku untuk layanan Komisi Eropa sampai ke *European External Action Service (EEAS)*, masing-masing untuk area di mana mereka bertanggung jawab, baik di markas besar dan di level Delegasi Uni Eropa. Koordinasi dan kolaborasi dengan Negara Anggota Uni Eropa akan terus dipastikan. Uni Eropa akan terus memastikan bahwa komitmennya pada kesetaraan gender ditafsirkan ke dalam hasil yang jelas dan nyata dan disertai peningkatan koordinasi, koherensi, kepemimpinan, bukti dan analisis gender, serta sumber daya keuangan dan manusia yang memadai. (Council, 2015)

European Consensus on Humanitarian Aid menyoroti pentingnya mengintegrasikan pertimbangan gender, menggabungkan strategi perlindungan terhadap kekerasan berbasis seksual dan gender dan mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam bantuan kemanusiaan. Komisi Eropa berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan mempertimbangkan hal yang berbeda kerentanan dan kapasitas perempuan dan laki-laki dari segala usia. Hal itu tercermin dalam komitmennya terhadap program bantuan berkualitas untuk keadaan darurat sesuai dengan mandat kemanusiaan Uni Eropa dan kemanusiaan internasional hukum dan komitmen. Proyek yang tidak mempertimbangkan pertimbangan gender berisiko menjadi tidak tepat sasaran, tidak

menjangkau mereka yang mungkin paling membutuhkan bantuan. (Commission, ECHO Factsheet, 2016)

Bantuan dan dukungan dapat diberikan dengan cara yang menantang prasangka tentang peran dan kemampuan perempuan, misalnya meningkatkan akses perempuan ke mata pencaharian - termasuk yang menantang asumsi pembagian kerja berdasarkan gender; meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan masyarakat; dan mengurangi beban pekerja rumah tangga dan pengasuhan anak yang tidak setara. Membangun *gender equality* dengan cara ini akan mengurangi risiko reaksi apa pun. Ini juga perlu untuk mengatasi kerentanan serta dampak langsung, sebagai bagian dari program terpadu untuk membangun ketahanan terhadap krisis di masa depan. Mengatasi ketidaksetaraan yang membuat banyak wanita lebih rentan terhadap krisis adalah bagian penting dalam membangun ketahanan ini. (Oxfam, 2013)

The Strategy for Equality between Women and Men menyajikan program kerja Komisi untuk periode 2010-2015 dan periode 2016-2020, mengidentifikasi gender equality dalam tindakan eksternal sebagai salah satu dari enam prioritasnya. Pada 2010, Komisi juga mengadopsi *Women's Charter*, sebuah deklarasi politik itu alamat gender di luar Perhimpunan sebagai salah satu bidang utama aksi. Desain dan implementasi semua tindakan kemanusiaan harus mempertimbangkan perspektif gender, untuk memastikan bahwa bantuan secara efektif disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat yang berbeda.

Setiap intervensi dalam setiap sektor, konteks atau lokasi dan dalam segala jenis krisis darurat, harus peka-gender, di seluruh siklus manajemen proyek, dari penilaian yang dihasilkan hingga pelajaran yang dipetik. Komisi menganggap gender sebagai kriteria penting

dalam pemilihan proyek-proyek kemanusiaan. Dalam hal bentuk-bentuk intervensi, Komisi memiliki pendekatan gender melalui tiga-jalur: pengarusutamaan, tindakan yang ditargetkan dan pengembangan kapasitas. Di dalam masyarakat tertentu, wanita mungkin tidak diizinkan untuk mengambil manfaat dari bantuan layanan yang disediakan oleh tim kemanusiaan yang semuanya laki-laki, atau wanita penyandang cacat, termasuk korban ranjau, mungkin tidak bisa menggunakan kursi roda berat yang dirancang untuk pria. Dengan tidak memperhitungkan batasan-batasan ini, beberapa kelompok mungkin kehilangan bantuan yang vital atau penting.

Upaya Uni Eropa untuk mempromosikan kesetaraan gender sejalan dengan komitmen konvensi internasional, *International Humanitarian Law (IHL)*, *International Human Rights Law (IHRL)* dan *Refugee Law*, yang menyediakan kerangka kerja untuk bantuan kemanusiaan Uni Eropa, juga mendefinisikan pentingnya tentang perlindungan kehidupan, kesehatan dan tentang larangan penyiksaan, perlakuan kejam atau diskriminasi. Diatas semua itu, khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak. *International Humanitarian Law*, yang mana adalah seperangkat aturan yang berlaku selama konflik bersenjata, khususnya melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin serta semua jenis serangan tidak senonoh, khususnya perkosaan dan pemaksaan pelacuran terhadap wanita, anak perempuan, anak lelaki atau laki-laki dan panggilan untuk wanita hamil dan ibu diberi perlindungan tambahan. Uni Eropa tidak sendiri dalam melaksanakan *humanitarian aid*, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaannya.

Pada bulan Januari 2014, Komisi memperkenalkan *Gender-Age Marker* untuk memastikan bahwa bantuan pertolongan lebih tepat

sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang terkena bencana, konflik, dan keadaan darurat yang berlarut-larut. Instrumen baru ini akan berfungsi sebagai alat berkualitas bagi mitra untuk menilai sejauh mana setiap aksi kemanusiaan mengintegrasikan pertimbangan gender dan usia. (Commision, The humanitarian challenge, n.d) *Gender-Age Marker*, alat akuntabilitas yang mengukur seberapa kuat semua tindakan kemanusiaan yang didanai Uni Eropa memadukan gender dan usia. Menurut penanda, pada tahun 2015, 89% dari semua tindakan kemanusiaan yang didanai Uni Eropa dengan kuat atau sampai batas tertentu mengintegrasikan gender dan usia dalam perencanaan mereka.

Pada tahun 2016, Komisi Eropa mengeluarkan kebijakan baru tentang perlindungan, berjudul "*Humanitarian Protection: Improving protection outcomes to reduce risks for people in humanitarian crises*", yang menekankan perlunya mempertimbangkan gender, memberikan panduan lebih lanjut untuk pemrograman kegiatan perlindungan, termasuk kekerasan berbasis gender. Memastikan bahwa gender dipertimbangkan dalam bantuan kemanusiaan Uni Eropa juga tercakup dalam *European Union Gender Action Plan 2016-2020* yang menetapkan kerangka kerja untuk tindakan untuk semua kegiatan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hubungan eksternal Uni Eropa, termasuk untuk 28 Negara Anggota. (Commission, Gender- and age-sensitive aid, 2018)

Langkah-langkah gender yang didukung oleh Uni Eropa adalah partisipasi perempuan yang lebih besar dalam pengelolaan kamp, pertimbangan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dan pelecehan ketika merancang akses ke layanan dan barang penting atau vital, penggunaan analisis gender dan kerentanan untuk secara sistematis menangani

kebutuhan perempuan dan anak-anak, dan langkah-langkah yang ditargetkan untuk mencegah kekerasan dalam intervensi kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki dapat mempertanyakan lembaga-lembaga sosial dan hubungan gender, dan untuk memecahkan hambatan antara wilayah tanggung jawab dan tindakan tradisional laki-laki dan perempuan. Pada tingkat program, tujuannya adalah untuk *gender mainstreaming* ke dalam sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan produksi. Uni Eropa selalu mempersilahkan mitra untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan pengetahuan gender, maka mereka tahu jika pada saat mereka menemukan atau menjumpai situasi diskriminasi atau pelecehan, korban atau saksi tidak akan diam.

Masyarakat yang berlokasi di daerah rawan bencana dilatih dalam praktik pembangunan terbaik, membangun sistem peringatan dan perencanaan respons. Dengan mempersiapkan bahaya alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi, dan banjir dengan cara ini, dampak bencana seperti itu akan berkurang secara signifikan. Terlepas dengan semua itu, risiko pekerja kemanusiaan diserang meningkat. Bangunan milik organisasi bantuan ditetapkan, kendaraan dibajak, dan personil dibunuh atau diculik. Ancaman keamanan terhadap pekerja bantuan tidak hanya membahayakan nyawa mereka yang bersedia membantu orang lain, tetapi juga menghambat pengiriman bantuan penyelamatan jiwa kepada jutaan orang. Inilah sebabnya mengapa Komisi Eropa berkontribusi pada penghormatan global dan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional melalui advokasi dan tindakan politik. (Medium, 2017)

Peningkatan program kesetaraan gender dalam pengaturan kemanusiaan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup semua anggota masyarakat, tetapi juga akses yang lebih besar terhadap layanan, identifikasi

kebutuhan penerima manfaat yang lebih baik, dan peningkatan pemberdayaan dan aspirasi di kalangan perempuan muda. (Response, n.d) Peran tradisional wanita sebagai pengasuh dan penyedia untuk keluarga berarti mereka memiliki posisi yang baik untuk memberi saran kepada agen mengenai layanan sanitasi, air, makanan, dan perawatan kesehatan yang tepat.

Krisis kemanusiaan atau bencana alam mengharuskan pemulihan negara dan masyarakatnya kembali seperti semula dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jika kesatuan negara yang besar seperti Uni Eropa tidak melakukan bantuan kemanusiaan akan salah. Uni Eropa telah mengeluarkan banyak dana untuk membantu negara-negara yang terkena konflik atau bencana alam yang sangat parah yang membutuhkan bantuan internasional untuk mengembalikan keadaan negaranya.

C. Gender-Sensitive Humanitarian Aid Di Berbagai Negara (Studi Kasus Di RDK, Pakistan, Sudan Selatan)

1. Republik Demokratik Kongo

Studi kasus pertama yaitu, kamp dan perlindungan dalam fase darurat di Kivu Utara. Kebutuhan kemanusiaan di RDK telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan. 2017 adalah salah satu tahun paling kejam dalam sejarah RDK baru-baru ini, dengan konflik yang sedang berlangsung di wilayah Kivu, pertempuran baru di Tanganyika dan konflik baru dan brutal di Kasai. Jumlah orang-orang Kongo yang dipaksa meninggalkan rumah mereka telah melampaui 5 juta, yang termasuk jumlah tertinggi orang-orang yang terlantar di Afrika. Ketegangan politik dan penurunan sosio-ekonomi diperburuk oleh peningkatan tajam dalam kekerasan. Krisis kemanusiaan kompleks DRC ditandai oleh konflik, pemindahan massal, kekurangan gizi dan epidemi. Selain jutaan penduduk Kongo yang

tergusur secara internal. (Commision, Democratic Republic of Congo, 2018)

Provinsi Kivu dan Ituri telah menjadi tempat pertempuran selama lebih dari dua dekade. Bentrokan yang lebih hebat meletus di provinsi Tanganyika, Kasai, dan Ituri. Menurut PBB lebih dari 3 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak di daerah-daerah ini, termasuk tempat tinggal, air, bantuan makanan, nutrisi, perawatan kesehatan dan pendidikan. Di Kasai, situasi keamanan pangan mengkhawatirkan: 1,9 juta orang membutuhkan bantuan. Di Tanganyika, rata-rata 1.000 orang per hari diasingkan pada tahun 2017 dan 900 000 orang sekarang membutuhkan bantuan penting. Di utara Kivu, segudang kelompok bersenjata menghambat pengiriman bantuan kepada ratusan ribu orang yang membutuhkan.

Pada tahun 2017, tanggapan Uni Eropa - baik Negara Anggota dan Komisi Eropa - terhadap berbagai krisis di DRC adalah sekitar € 163 juta. Ini termasuk hampir € 28 juta bantuan kemanusiaan Uni Eropa dari Komisi. Operasi kemanusiaan didanai melalui *Commission's Civil Protection and Humanitarian Aid department (ECHO)* fokus untuk membantu orang-orang yang terkena dampak kekerasan baru-baru ini atau yang sedang berlangsung, kekurangan gizi akut, dan epidemi. Prioritas bantuan kemanusiaan Uni Eropa adalah untuk memberikan korban kekerasan dan pengungsi populasi dengan perlindungan dan bantuan yang menyelamatkan jiwa tepat waktu. (Commision, Democratic Republic of Congo, 2018) Mitra kemanusiaan Uni Eropa termasuk badan-badan PBB, Palang Merah dan sejumlah LSM. Mereka melakukan berbagai kegiatan: merawat anak-anak yang kekurangan gizi dan menyediakan perawatan kesehatan darurat, termasuk perawatan khusus bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual selama terjadinya krisis.

Perempuan sering dipisahkan dari laki-laki anggota keluarga dalam keadaan darurat, dan ini menciptakan risiko tambahan seperti ancaman kekerasan seksual yang telah menjadi permasalahan di Kivu Utara. Banyak bantuan kemanusiaan difokuskan pada populasi kamp, karena lebih banyak perempuan, orang tua, dan anak-anak yang masih memiliki kebutuhan yang penting seperti sanitasi, air bersih, obat-obatan, dan terlebih jika ada perempuan yang sedang hamil yang seharusnya memiliki kebutuhan yang lebih untuk keamanan kehamilannya.

Namun, keuntungan dari strategi ini harus diseimbangkan dengan bahaya dari kamp yang diserang oleh para perampok dan mereka yang cenderung merusak bantuan kemanusiaan. Diperkirakan kurang dari 30% pengungsi di Kongo berada di kamp, dan lebih dari 70% berada di komunitas tuan rumah. Proporsi yang rendah di kamp telah dikritik sebagai akibat dari kinerja pasukan keamanan yang buruk, tetapi keinginan orang untuk tetap dekat dengan tanah mereka dan untuk mengusahakannya jika memungkinkan juga merupakan bagian dari penjelasan.

Di RDK, Uni Eropa memberikan perhatian kepada para korban kekerasan seksual dan berbasis gender dan membantu mereka untuk berintegrasi kembali dengan komunitas mereka. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan kembali mekanisme perlindungan masyarakat lokal dengan mendukung akses tepat waktu ke layanan kesehatan dan dukungan psikososial, termasuk kegiatan perlindungan dan mata pencaharian, dan dengan mendorong mitra untuk meningkatkan koordinasi.

2. Sudan Selatan

Sejak perang saudara meletus di Sudan Selatan pada bulan Desember 2013, perkelahian, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak asasi manusia terus

berlanjut sementara pembatasan yang diberlakukan dan ketidakamanan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan. Konflik di negara termuda dunia memasuki tahun kelima pada tahun 2018. Peringatan kelaparan telah berlangsung sejak awal 2017. Krisis ini adalah buatan manusia dan memiliki efek buruk di wilayah tersebut; sekitar 2 juta orang Sudan Selatan telah berlindung di negara-negara tetangga dan diperkirakan bahwa 570.000 orang lagi akan melarikan diri dari negara itu pada 2018. (Commission, South Sudan, 2018)

Sudan Selatan menderita akibat konflik dan penelantaran selama puluhan tahun, korupsi dan salah urus. Kekerasan ekstrem ditambah dengan penurunan ekonomi dan memburuknya kerawanan pangan telah menyebabkan krisis proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidapatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) oleh pihak-pihak yang bertikai adalah kekhawatiran yang konstan. Menurut PBB, 7 juta orang Sudan Selatan - lebih dari separuh penduduk - akan membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan pada 2018. Jumlah pengungsi, baik secara internal maupun lintas batas, telah meningkat menjadi lebih dari 4 juta. Konflik telah memicu suatu eksodus massal sekitar 2 juta orang terutama ke Uganda, Kenya, Ethiopia, dan Sudan.

Hampir 2 juta orang Sudan Selatan telah melarikan diri melintasi perbatasan. Uni Eropa mendukung pengungsi dengan bantuan makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan dan gizi, perlindungan termasuk bantuan psiko-sosial, air, sanitasi dan kebersihan, serta pendidikan. Program perlindungan dana dari Uni Eropa untuk anak di bawah umur dan bagi perempuan yang selamat dari kekerasan seksual dan gender. (Commission, South Sudan, 2018)

Di Sudan Selatan banyak keluarga terpisah, meninggalkan lansia dan anggota rentan lainnya di

belakang, sementara anak-anak, terutama anak laki-laki, menghadapi risiko perekrutan oleh pasukan bersenjata. Remaja laki-laki takut akan kekerasan dan kematian ketika pindah ke luar kamp dan permukiman. Perincian struktur sosial dalam komunitas mengurangi perlindungan bagi perempuan dan melibatkan mereka dalam beberapa peran baru. Tingkat kekerasan seksual adalah bencana. Pria dan anak laki-laki dapat meningkatkan penggunaan alkohol atau penyalahgunaan zat, dan ini menciptakan risiko perlindungan tambahan bagi wanita dan anak perempuan. Meningkatnya rasa tidak aman terbukti menghambat perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam gerakan mereka di luar kamp atau komunitas karena kekerasan seksual berbasis gender, namun kelaparan yang parah memaksa mereka pergi ke luar kawasan yang dilindungi. Karena sifat patriarkal masyarakat di Sudan Selatan, yang membuat perempuan berada pada posisi yang lebih rendah, mereka hanya menjalankan kekuasaan pengambilan keputusan yang terbatas di tingkat rumah tangga dan masyarakat. (Oxfam, *Institutionalizing Gender in Emergencies: Case study of South Sudan*, 2017)

Sudan Selatan berusaha untuk membuat pendidikan dapat diakses untuk anak perempuan dan perempuan pada tahun 2040 dalam upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Negara telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memajukan pendidikan anak perempuan karena jumlah anak perempuan di sekolah dasar telah meningkat menjadi hampir 1 juta pada tahun 2015 dibandingkan kurang dari seperempat juta pada tahun 2006. Negara ini juga telah meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan jumlah guru di negara itu dari 19.000 pada tahun 2006 menjadi 37.000 pada tahun 2015, dan inisiatif *Girls Education South Sudan* yang dipimpin

pemerintah sekarang mendukung 1.300 gadis sekolah di Sudan Selatan. (Jinzheng, 2016)

3. Pakistan

Selama bertahun-tahun, Pakistan barat laut, yang berbatasan dengan Afghanistan, telah dirusak oleh operasi militer dan pemberontak. Hasilnya adalah penderitaan manusia dan perpindahan penduduk internal skala besar di daerah yang sudah berkembang buruk. Ini diperparah dengan adanya sekitar 2,7 juta pengungsi Afghanistan. Selain itu, Pakistan mengalami banjir berulang dan gempa bumi, dan menderita beberapa kerawanan pangan terburuk di dunia dan malnutrisi kronis. Perkembangan konflik terbaru pada tahun 2014 mendorong perpindahan lebih dari satu juta, menambah orang-orang yang masih mengungsi dari tahun-tahun sebelumnya dan menekan fasilitas yang sudah terbatas di daerah hosting. Sementara lebih dari 1,5 juta pengungsi telah kembali ke tempat asal mereka setelah percepatan pengembalian selama dua tahun terakhir, lebih dari 174.000 orang tetap mengungsi pada Desember 2017. (Commission, Pakistan, 2018)

Krisis pengungsi Afghanistan adalah salah satu krisis pengungsi terbesar dan paling berkepanjangan di dunia. Sejak 2015, ada tekanan yang meningkat pada pengungsi untuk kembali, seringkali melalui pelecehan dan intimidasi, yang membutuhkan peningkatan serentak dalam layanan perlindungan. Pada 2018, Uni Eropa telah mengalokasikan € 5,5 juta untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Pakistan dan pengungsi Afghanistan yang diasingkan secara internal, serta untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas masyarakat rentan untuk merespon bencana alam di masa depan dengan lebih baik.

Komisi Eropa membantu orang-orang Pakistan terlantar yang paling rentan di wilayah perlindungan mereka dan di daerah-daerah yang mereka kembalikan,

terutama dengan dukungan untuk fasilitas air dan sanitasi. Meskipun sebagian besar pengungsi Afghanistan diintegrasikan ke dalam masyarakat Pakistan, beberapa hidup huyung di komunitas terpencil di mana proyek-proyek yang didanai Uni Eropa membantu mereka dengan layanan kesehatan, fasilitas air dan sanitasi, dan layanan perlindungan hukum. Uni Eropa telah beroperasi di Pakistan sejak tahun 1990-an, memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena dampak konflik dan bencana alam besar, termasuk gempa bumi tahun 2005 dan banjir dahsyat antara 2010 dan 2015, yang mempengaruhi total lebih dari 30 juta orang. Barang-barang bantuan disalurkan kepada korban banjir melalui Mekanisme Perlindungan Sipil Uni Eropa. Sejak 2009 sampai saat ini, bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk orang-orang yang membutuhkan di Pakistan telah mencapai € 554,5 juta. (Commission, Pakistan, 2018)

Selama respon terhadap gempa Pakistan 2005, beberapa mitra dari Uni Eropa meningkatkan akses untuk layanan kesehatan bagi perempuan, mendorong pembentukan kelompok-kelompok perempuan, melatih dan mempekerjakan perempuan dan memberikan bantuan yang ditargetkan kepada para janda. Namun, biro iklan menyebut gender sebagai masalah wanita daripada mempertimbangkan peran diferensial pria dan wanita. Karena itu, beberapa aspek penting dari kehidupan pria diabaikan, seperti gangguan dalam pekerjaan migran atau mereka kebutuhan kesehatan reproduksi. Juga, peluang untuk menantang gender stereotip melalui keterlibatan pria dan anak laki-laki mungkin telah terlewatkan.

Pakistan merupakan negara dengan pembangunan manusia yang sangat rendah dan sejumlah besar orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Diikombinasikan dengan salah satu tingkat ketidaksetaraan gender tertinggi di dunia. Antara tahun

2015 sampai 2017 Uni Eropa bekerjasama dengan mitra seperti PBB, organisasi bukan pemerintah, Humanitarian Forum, *the gender in emergencies working group* (GEIWG), agensi pemerintahan untuk mempromosikan gender equality, dimulai dengan tahun 2015 Penciptaan Kelompok Kerja Gender dalam Keadaan Darurat, meningkatkan analisis gender, Mengembangkan Kapasitas Teknis dalam Gender dalam Keadaan Darurat, Struktur Koordinasi, dan meningkatkan kepekaan masyarakat Pakistan akan pentingnya gender equality. GEIWG juga mendukung dan terlibat meninjau kerangka kerja kebijakan komprehensif Aurat Foundation di atas hak-hak orang-orang yang dipindahkan secara internal (IDP), dan memberikan bantuan teknis mendukung studi pelingkupan tentang GBV dalam pengaturan kemanusiaan pada tahun 2015 bekerja sama dengan *the UN Population Fund*. (Oxfam, South Sudan Gender Analysis, 2016)